KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & TRANSMIGRASI

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Ahmad Erani Yustika I Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan

Desember 2017

OUTLINE

- Politik Desa
- Tri Matra Pembangunan Desa
- Dana Desa dan Pemanfaatannya
- Indek Desa Membangun (IDM)
- Relevansi Pembangunan Kawasan
- Fungsi Pembangunan Kawasan
- Pembangunan Kawasan

Politik Desa

Dwi Asas: kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan hak asal usul.

Perspektif utuh pembangunan (TRIMATRA):
JAMU DESA, BUMI DESA, KRYA DESA

Balai Rakyat: Pembangunan desa harus bertumpu pada penguatan stok pengetahuan warga/komunitas desa

POLITIK KEDAULATAN DESA

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Rekognisi	Subsidiaritas

Musyawarah Desa (Musdes)
Warga sebagai partisipan gerakan

Desa hidup berdasarkan dinamika norma, budaya, adat, keyakinan, dan agama yang menjadi mata air pengetahuan dan konsensus dalam menjaga kehidupan bersama

Desentralisasi dalam literatur ekonomi dan politik.

Memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan dan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan selama berada dalam skala desa

POLITIK PEMBANGUNAN DESA: Kerangka Kebijakan dan Trimatra Pembangunan Desa

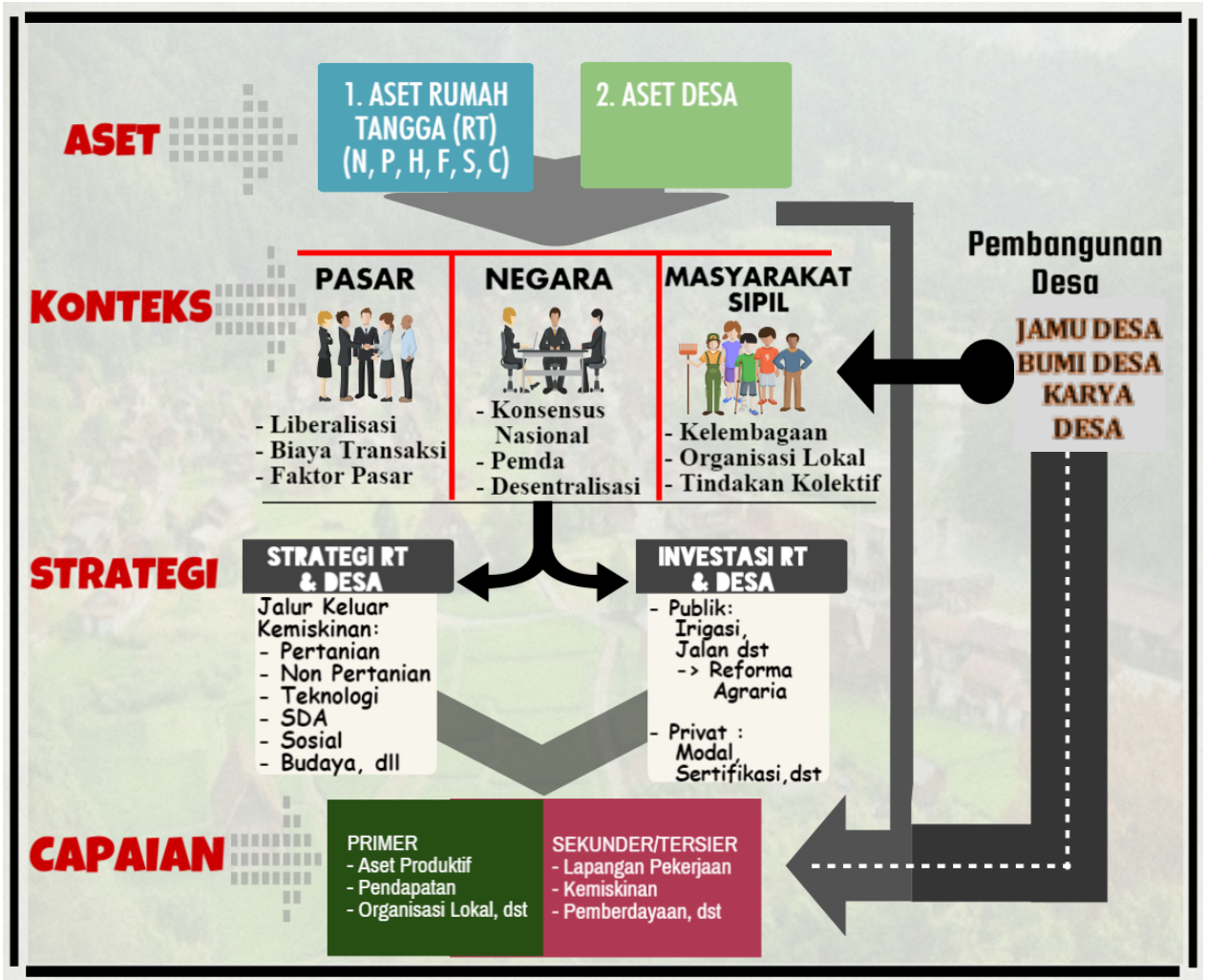

POLITIK LITERASI DESA: BALAI RAKYAT

Rumah Desa Sehat

Rumah Belajar

Rumah Pengembangan Ekonomi

Rumah Produksi Desa

Sarana Informasi dan ‘Perpusatakaan Desa

DANA DESA

Kebijakan pemerintah dalam bentuk pergeseran politik fiskal

Dana Desa (DD)

Penyerapan 2015
82,72%

Penyerapan 2016
97,65%

2015	2016	2017
Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa)	Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa)	Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa)

Pemanfaatan Dana Desa

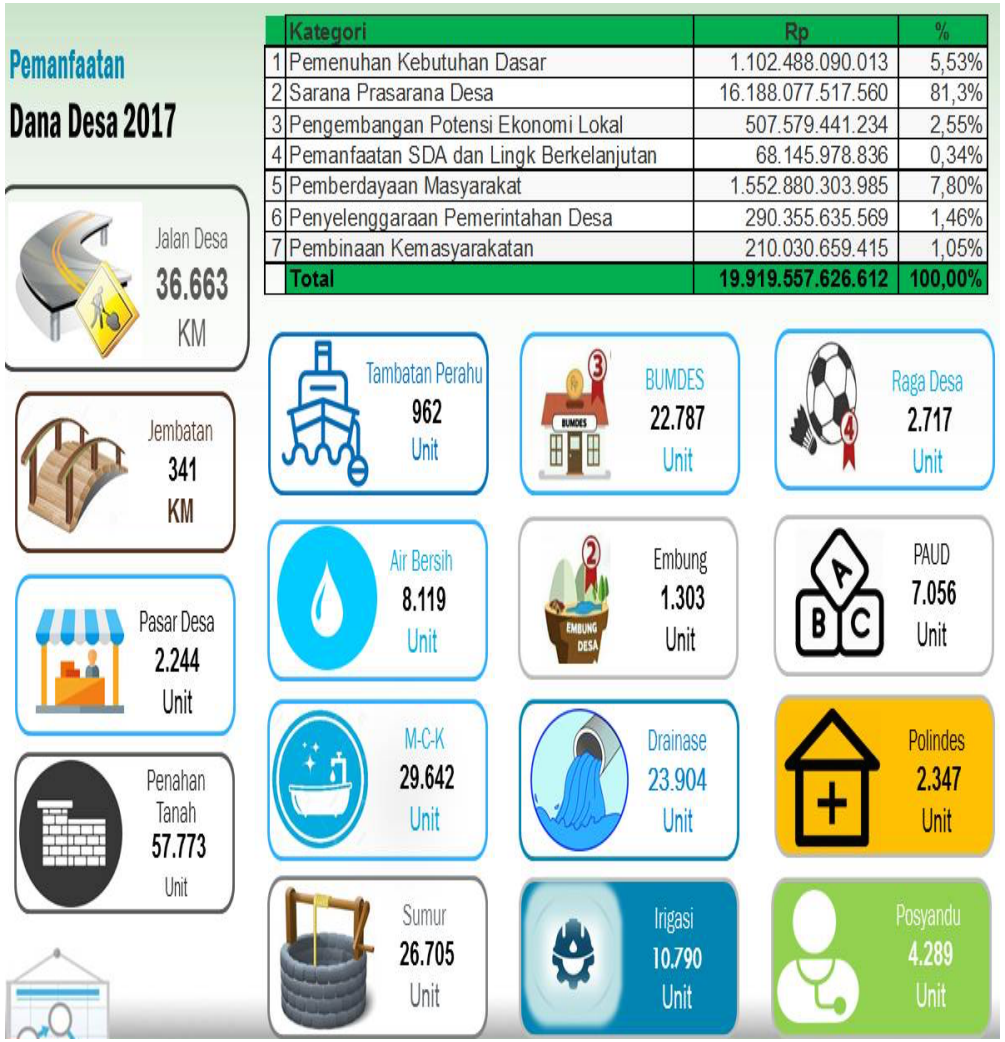

	Kategori	Rp	%
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1.102.488.090.013	5,53%
2	Sarana Prasarana Desa	16.188.077.517.560	81,3%
3	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	507.579.441.234	2,55%
4	Pemanfaatan SDA dan Lingk Berkelanjutan	68.145.978.836	0,34%
5	Pemberdayaan Masyarakat	1.552.880.303.985	7,80%
6	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	290.355.635.569	1,46%
7	Pembinaan Kemasyarakatan	210.030.659.415	1,05%
	Total	**19.919.557.626.612**	**100,00%**

01 Maraknya kegiatan Musdes dan keterlibatan warga dalam perencanaan sampai eksekusi pembangunan

02 Transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelanggara pemerintahan desa

03 Keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga

04 Ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas

05 Munculnya aneka upaya untuk memerkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

KLASIFIKASI STATUS DESA

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari:

a) Indeks Ketahanan Sosial,

b) Indeks Ketahanan Ekonomi dan

c) Indeks Ketahanan Ekologi Desa

Klasifikasi status desa berdasarkan IDM antara lain:

1. *Desa Sangat Tertinggal*
2. *Desa Tertinggal*
3. *Desa Berkembang*
4. *Desa Maju*
5. *Desa Mandiri*

JUMLAH & PERSENTASE DESA BERDASARKAN IDM 2015

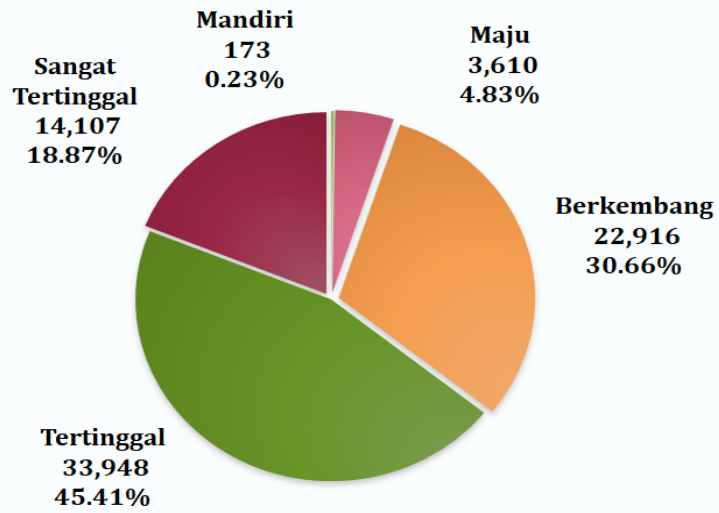

Sumber: Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016

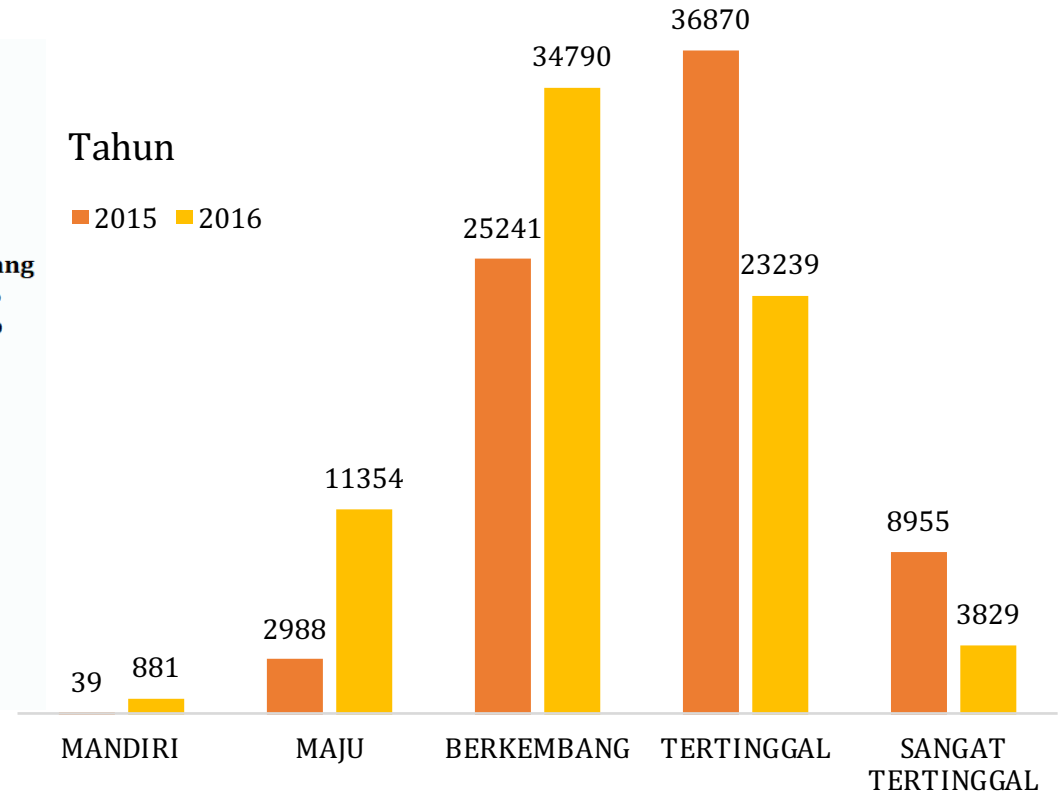

PERKEMBANGAN STATUS DESA 2016

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)			Target RPJMN
(%) Perubahan 2015-2016	Total Desa Tertinggal	Desa Terentaskan	Desa Terentaskan
20.76%	48.055 Desa	**9.975 Desa**	5.000 Desa
(%) Perubahan 2015-2016	Total Desa Berkembang	Desa Menjadi Mandiri	Desa Menjadi Mandiri
15.30%	26.526 Desa	**4.058 Desa**	2.000 Desa

MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
BERTAMBAH 842 DESA	BERTAMBAH 8.367 DESA	BERTAMBAH 9.548 DESA	BERKURANG 13.631 DESA	BERKURANG 5.126 DESA

PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

3 RELEVANSI KAWASAN:

01 MENDORONG EKONOMI YANG MEMILIKI NILAI TAMBAH

Sumber keterbelakangan desa karena hanya memproduksi bahan baku. Kesejahteraan berasal dari sektor pengolahan (yang punya nilai tambah).Syarat yang harus dipenuhi mesti ada skala ekonomi. Skala ekonomi hanya bisa pada level kawasan perdesaan, bukan desa.

02 MEMPERKUAT POSISI TAWAR

Pelaku ekonomi desa hanya bisa sebagai "price taker" (penerima harga) sebab terpecah dalam individu/kelompok kecil. Bila mereka bergabung dalam kawasan (dan dikelola oleh Bumdes Bersama, misalnya), maka posisi tawar mereka akan kuat dan menjadi "price maker" (penentu harga).

03 MENCEGAH KANIBALISME ANTAR DESA

VS

Jika desa dibiarkan berkompetisi satu dengan yang lain, maka mereka akan saling mematikan (bunuh) dan menguntungkan pelaku ekonomi besar (di kota). Desa-desa diajak berkolaborasi (cooperation), bukan berkompetisi (competition), agar menghasilkan kesejahteraan bersama.

4 FUNGSI KAWASAN:

01

DEEPENING (PENDALAMAN):

Pendalaman pembangunan mengharuskan adanya konsolidasi sumber daya agar terpenuhi skala ekonomi.
Konsolidasi sumber daya harus dengan jalan menggabungkan kerjasama desa

02

BRIDGING (MENJEMBATANI):

relasi desa - kota sulit dibangun secara setara karena ketimpangan (sosial, ekonomi, politik, budaya, dll).
Desa-desa mesti diperkuat dulu dengan jalan kolaborasi membentuk kawasan agar bisa berhubungan dengan kota secara seimbang.
Fungsi kawasan di sini sebagai jembatan (mediasi).

03

COLLABORATING (MENGERJASAMAKAN):

banyak pemangku kepentingan yg bisa diajak membangun desa (pemerintah, dunia usaha, universitas, LSM, Ormas, dunia internasional, dsb), tapi mesti dikelola dengan kapasitas yang memadai. Kawasan lebih sanggup mengorganisasikan pemangku kepentingan dalam poros kolaborasi ketimbang pada level desa

04

CONTROLLING (PENGENDALIAN):

bagi pemerintah atau pelaku tertentu pasti dibatasi kemampuan untuk pengendalian program.
Rentang kendali pada level kawasan lebih mungkin diupayakan daripada desa yang jumlahnya amat banyak.

5 (K) DIMENSI PENYANGGA KAWASAN:

01 KONSENSUS (ANTARDESA):

desa yang bergabung harus merumuskan dan mengambil keputusan bersama atas konsep dan matriks kolaborasi pembangunan kawasan.

02 KETERPADUAN (HULU-HILIR):

kawasan yang berhasil bukan hanya harus fokus, tetapi juga bisa memadukan aktivitas dari hulu (produksi) sampai hilir (pemrosesan, distribusi, pemasaran, dll)

03 KELEMBAGAAN (ORGANISASI DAN ATURAN MAIN):

memapankan organisasi ekonomi (Bumdes Bersama atau yang lainnya) yang menopang pengembangan kawasan merupakan keniscayaan, termasuk menyusun segenap aturan main agar organisasi ekonomi itu mapan.

04 KOMUNITAS (ALAS GERAKAN):

pembangunan kawasan mesti merupakan gerakan warga dan pemangku kepentingan pada tingkat lokal, bukan semata hasrat pemerintah, pendamping, atau pelaku di luar kawasan.

05 KEBERLANJUTAN (PENGELOLAAN):

pembangunan kawasan merupakan proses yang tidak berhenti, namun pengembangan terus-menerus. Di sini dibutuhkan komitmen keberlanjutan dari seluruh pemangku kepentingandengan menghidupkan seluruh potensi lokal.

KOLABORASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

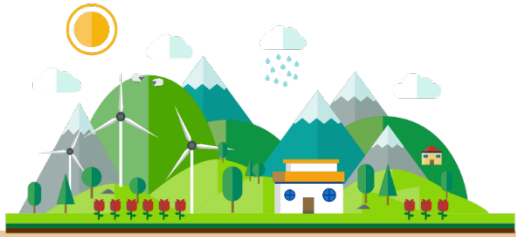

RELASI

Desa

Kawasan Perdesaan

Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kolaborasi Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa

Dana Desa

Program Pembangunan dan Pemberdayaan serta Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pendekatan TRI MATRA Pembangunan Desa
- JAMU DESA
- BUMI DESA
- KARYA DESA

Pembangunan Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya melalui Kearifan Lokal

Agenda Nasional:
- Reforma Agraria
- Perhutanan Sosial

PRINSIP DAN UNSUR KOLABORASI

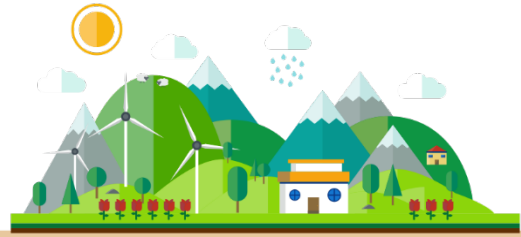

- *Common understanding*
- *Mutual agreement*
- *Collective action*

Prinsip

Unsur

- Kesetaraan
- Komitmen
- Konsekuen
- kontinuitas

Menyusun Nilai

Pijakan/prinsip yang dipegang untuk memilah dan memilih bentuk serta pihak yang akan di ajak kerjasama

Merumuskan Strategi

- Strategi menuju terwujudnya kerjasama
- Model optimalisasi pemanfaatan kerjasama yang dilakukan

Mekanisme Eksekusi

- Pemilihan lembaga-lembaga potensial
- Membangun jejaring dan komunikasi
- Memperkuat kepercayaan (*trust*)
- Penguatan kapasitas (legal, managerial, teknikal

TEMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

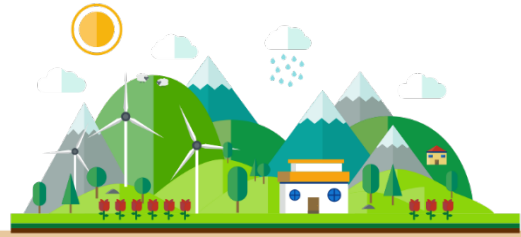

445 kawasan Agribisnis

144 kawasan pariwisata

141 kawasan minapolitan

99 kawasan transmigrasi

24 kawasan home industry

27 kawasan kehutanan

15 kawasan pertambangan

12 kawasan industri

Hingga saat ini Kawasan Perdesaan Tematik yang ada dalam Data Base Kementerian Desa berjumlah 907 Kawasan tersebar di 261 kabupaten/kota seluruh Indonesia

28 kawasan Program pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan

54 kawasan program Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis masyarakat

40 Kawasan Pusat Pertumbuhan baru – Keterkaitan Kota Desa

48 Kawasan Perkotaan Baru-Kota Terpadu Mandiri

Terdapat 76 kawasan perdesaan yang telah dan sedang diintervensi sejumlah Program pengembangan kawasan sejak tahun 2015. Serta Kawasan Perdesaan Usulan Daerah

Dan 693 Kawasan Perdesaan Usulan Daerah

Kerangka Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

DESAIN LINGKUNGAN YANG SEHAT

DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

- Sosial
- Ekonomi
- Ekologi
- Administrasi Pemerintahan

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

- ORGANISASI
- NORMA
- NILAI
- PILIHAN/PROSES KEBIJAKAN

Pendekatan Tri Matra:
- Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa)
- Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa)
- Lingkar Budaya Desa (Karya Desa)

TATA KELOLA PEMBANGUNAN

- Pemberdayaan kawasan
- Promosi ekonomi kawasan
- Perbaikan modal sosial kawasan

PENGUATAN PENGHIDUPAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pendekatan Tri Matra:
- Jaring Komunitas Wiradesa (Jamu Desa)
- Lumbung Ekonomi Desa (Bumi Desa)
- Lingkar Budaya Desa (Karya Desa)

KEGIATAN PRIORITAS KEMENDESA, PDTT TAHUN 2017

NILAI TAMBAH

PRUDES & PRUKADES:
dalam meningkatkan skala ekonomi berbasis Teknologi & Inovasi

PEMAPANAN ORGANISASI EKONOMI

BUMDES /BUMDESA BERSAMA:
untuk kemandirian ekonomi desa

KEMANDIRIAN PANGAN

EMBUNG :
untuk ketahanan pangan

PEMULIHAN MODAL SOSIAL

SARANA OLAH RAGA:
untuk kohesi sosial

G E R A K A N PEMBANGUNAN PRODUK UNGGULAN KAWASAN PERDESAAN

- Meningkatkan kualitas SDM kawasan perdesaan
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana kawasan perdesaan
- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
- Pengembangan SDA & peningkatan kualitas lingkungan

PERENCANAAN DAN TATA KELOLA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL & TRANSMIGRASI

TERIMA KASIH